

## **ANALYSIS ON POSSIBLE LEGAL ARGUMENTS AND SECURITY EXCEPTIONS DEFENSE IN WTO DISPUTES CONCERNING BOYCOTT ON TRADE IN SERVICES AGAINST QATAR**

By:

Wyncent Halim<sup>1</sup> and M. Hawin<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

On 5 June 2017, Bahrain, UAE and Saudi Arabia imposed an utter blockade against Qatar by closing their land, sea and air borders, which consequently affected the trade in goods, services and intellectual property rights from and to Qatar. Despite the overarching implication, this Legal Research seeks to analyze the possible legal violations arising out of the GATS, particularly in relation to measures affecting maritime transport services. In response, Bahrain, UAE and Saudi Arabia resort to security exceptions as their legal defense pursuant to Article XIV<sup>bis</sup> of GATS. The plausibility of such invocation given its *sui generis* nature will also be subject to the analysis of this Legal Research.

This Legal Research employs doctrinal legal research method that refers to normative framework. It predominantly relies on laws and regulations along with literature studies to render analysis on the issues.

This Legal Research comes to a conclusion that *firstly*, Bahrain, UAE and Saudi Arabia violate their Most-Favoured Nations Treatment obligation in lieu of Article II of the GATS; *secondly*, Saudi Arabia violates its specific Market Access commitment in lieu of Article XVI of the GATS; and *thirdly*, the imposition of such measures cannot be justified under the security exceptions clause.

**Keywords:** GATS, MFN Clause, Market Access, Security Exceptions, Boycott Against Qatar

---

<sup>1</sup> Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2014).

<sup>2</sup> Lecturer of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

***ANALISIS TERHADAP POTENSI ARGUMENTASI HUKUM DAN  
PEMBELAAN BERDASARKAN PENGECUALIAN ATAS DASAR  
KEAMANAN DALAM KASUS WTO PERIHAL BOIKOT TERHADAP  
PERDAGANGAN SEKTOR JASA QATAR***

Oleh:

*Wyncent Halim<sup>3</sup> dan M. Hawin<sup>4</sup>*

***INTISARI***

*Pada tanggal 5 Juni 2017, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi melakukan blokade penuh terhadap Qatar melalui penutupan batas darat, air dan udara, sehingga mempengaruhi perdagangan di sektor barang, jasa dan hak-hak kekayaan intelektual dari dan ke Qatar. Terlepas dari implikasinya yang menyeluruh, Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa potensi pelanggaran hukum berdasarkan GATS, khususnya mengenai tindakan-tindakan yang mempengaruhi sektor jasa transportasi maritim. Sebagai respons, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menggunakan pengecualian atas dasar keamanan sebagai pembelaan hukum berdasarkan Pasal XIV<sup>bis</sup> GATS. Menimbang karakter sui generis nya, kemungkinan diterimanya pembelaan hukum tersebut juga akan menjadi objek analisis Penelitian Hukum ini.*

*Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum berdasarkan doktrin yang merujuk pada kerangka penelitian normatif. Penelitian Hukum ini pada pokoknya bertumpu pada hukum dan peraturan yang berlaku serta studi literatur dalam memberikan analisa terhadap pokok permasalahan.*

*Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi melanggar obligasi Most-Favoured Nations berdasarkan Pasal II GATS; kedua, Arab Saudi melanggar komitmen khususnya perihal Market Access berdasarkan Pasal XVI GATS; dan ketiga, pengenaan tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diberikan justifikasi hukum berdasarkan klausul pengecualiaan atas dasar keamanan.*

***Kata Kunci:*** *GATS, klausul MFN, Market Access, Pengecualian Atas Dasar Keamanan, boikot terhadap Qatar*

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (SI IUP 2014).

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.